

Resolusi Konflik Aceh dan Maluku

Adinda Syifa'us Syauqiyah
Universitas Moch. Sroedji Jember
22020155036@umsj.ac.id

Dina Neely Hariyani
Universitas Moch. Sroedji Jember
22020154964@umsj.ac.id

Agus Danugroho
Universitas Moch. Sroedji Jember
agusdanu@umsj.ac.id

Abstrak: Tulisan ini menganalisis permasalahan disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Aksi teror yang dilakukan GAM dan RMS dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melalui pembakaran gedung-gedung publik dan sejumlah pembunuhan. Demikian pula, upaya untuk memecah negara juga dilakukan melalui publisitas melalui hiburan virtual. Jika tindakan tersebut tidak segera diselesaikan, akan ada ancaman disintegrasi Papua dari Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai propaganda Aceh Merdeka dan Republik Maluku Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan sosial perbedaan yang mencolok antara pemerintah pusat dan daerah. Separatisme dan disintegrasi bangsa merupakan persoalan kompleks akibat akumulasi persoalan politik, ekonomi, dan keamanan yang tumpang tindih sehingga memerlukan penanganan yang cermat dengan fokus pada aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya oleh karena itu, mengkaji fenomena ini Sebagai bangsa dan bangsa yang besar, Indonesia harus menyadaridengan jalan apa menjaga hubungan otoritas dengan penduduk sebagai dapat melaksanakan hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Kata kunci: disintegrasi bangsa; konflik Aceh; konflik Maluku; resolusi konflik.

Abstract: *This paper analyzes the problems of national disintegration that have occurred in Indonesia. Terror acts carried out by GAM and RMS were carried out by the Armed Criminal Group (KKB) through the burning of public buildings and a number of killings. Likewise, efforts to divide the country are also made through publicity through virtual entertainment. If these actions are not resolved immediately, there will be a threat of disintegration of Papua from Indonesia. This research aims to identify various propaganda for Aceh Merdeka and the Republic of South Maluku. This research uses descriptive qualitative method. The results in this study are that there are striking social differences between the central and regional governments. Separatism and national disintegration are complex problems resulting from an accumulation of overlapping political, economic and security issues that require careful handling with a focus on legal, justice and socio-cultural aspects. Therefore, studying this phenomenon As a great nation and nation, Indonesia must be aware of how to maintain the relationship between the authorities and the population so as to be able to carry out the rights and obligations of the state towards its citizens.*

Keywords: *disintegration of the nation; Aceh conflict; Maluku conflict; conflict resolution.*

PENDAHULUAN

Perjuangan adalah suatu kekhasan yang wajar pada manusia, baik dalam skala terbatas, misalnya perselisihan perseorangan, misalnya antar sahabat, maupun dalam lingkup yang sangat luas seperti perjuangan antar bangsa (Chandra, 1992). Perjuangan adalah sebuah keanehan yang terjadi dalam kehidupan manusia dimana terjadi persaingan dan pertarungan antar para penghibur yang mempengaruhi hubungan antara para penghibur tersebut yang cenderung memburuk (Chilcote, 2003). Bentrokan biasanya disebabkan oleh proses berpikir untuk mencapai, merebut dan melindungi keinginan dan kepentingan mereka yang dilakukan dengan cara berbeda yang kadang-kadang merugikan orang lain (Abbas, 2004).

Keruntuhan adalah kebalikan dari penggabungan, kemerosotan adalah pemisahan atau pembagian unit-unit, misalnya Timor Timur yang diisolasi dari Indonesia pada tahun 1999. Sedangkan percampuran adalah penyatuan komponen-komponen dari berbagai agama atau suku ke dalam satu masyarakat, yaitu percampuran. adanya kesempatan yang setara bagi semua individu dari masyarakat tersebut (Alamsyah, 2012; Danugroho, 2022). Di masyarakat umum di mana pencapaian individu di bidang pelatihan, izin masuk ke kantor swasta atau publik, pintu terbuka bisnis yang berharga dan tanggung jawab untuk hak istimewa tidak boleh ditolak atau dibatasi atas dasar ras, agama, atau permulaan publik, misalnya: di AS, kombinasi minoritas yang didominasi kulit hitam ke dalam masyarakat kulit putih, telah muncul pada langkah-langkah pengaturan dan legitimasi yang didukung oleh aktivis kebebasan penduduk sejak sanksi koreksi UUD 1868.

Keterkaitan antara perjuangan dan kehancuran adalah bahwa tidak semua konflik mengarah pada kehancuran, misalnya dalam kasus-kasus mendasar seperti perjuangan manusia, jika cenderung segera diselesaikan dan tidak ditunda, tidak akan menyebabkan kehancuran (perpecahan antara kedua kelompok sehingga mereka tidak ingin menjadi sahabat lagi), namun keadaan kedua pemain tetap aman (Danugroho, 2022). Kemudian lagi, keterpurukan harus selalu dimulai dengan perjuangan masa lalu, bagaimanapun kekuatannya, baik karena kasus yang sederhana maupun kasus yang kompleks atau menutupi, seperti kasus runtuhnya Timor Timur dari Indonesia (Amirrachman, 2007). Hal ini juga diperkuat dengan penilaian bahwa perjuangan, khususnya masalah sosial-pemerintahan, menimbulkan rasa perpecahan. Dengan asumsi bahwa antusiasme berjalan tanpa batasan yang dipaksakan, asosiasi yang ada sebelumnya akan hancur berkeping-keping (Giddens, 1987).

Demikian pula, perjuangan yang tertunda akan menyebabkan apa yang sedang terjadi. Kedua keadaan ini sangat menguntungkan negara-negara penjajah pemukim yang perlu menengahi dan mengontrol sumber daya penting suatu negara (Lokollo, dkk, 1997). Dalam pendekatan gaya lama, ada sudut pandang behavioralistik yang merekomendasikan agar perselisihan antar negara terjadi karena cara berperilaku yang kuat dari negara-negara tersebut (Ritzer & Godman, 2005). Negara dipandang sebagai penghibur yang dominan dalam pertikaian dengan tujuan agar negara tidak dibedakan dari seseorang. Rakyat dianggap memiliki sifat memaksa, begitu juga dengan negara. Sebelum perang virus sering terjadi bentrokan antar negara yang muncul dalam konflik signifikan antar negara dan, yang mengejutkan, konflik universal (Lampe, 2007).

Sedangkan setelah perang virus terjadi perang perantara (konflik kecil namun memakan korban lebih banyak) yang dapat muncul sebagai benturan di dalam negeri, misalnya bentrok yang meliputi faktor suku atau etnik, ras, golongan, misalnya di Indonesia terjadi bentrok di

Sambas, Timur Timor, Papua, dan lain-lain. Jika di Indonesia terlihat banyak konflik yang terjadi, maka anggap saja kita menambahkannya dengan berbagai daerah di dunia yang mengalami konflik di dalam negeri mungkin tidak akan ada habisnya. Dalam rangkaian pengalaman umat manusia, dunia tidak terbebas dari perjuangan, yang ketika sampai pada tingkat yang intens menjadi perang bahkan pada tingkat global. Sejarah memainkan peran penting dalam keberadaan manusia (Danugroho, 2020).

Sejarah tidak hanya membaca dan berkonsentrasi pada masa lalu, tetapi lebih dari itu berkonsentrasi pada sejarah terkait dengan belajar bagaimana mengambil ilustrasi dari setiap peristiwa sebelumnya (Rudy, 2003). Hal-hal positif yang terjadi di masa lalu dapat kita manfaatkan untuk diterapkan di masa sekarang dan di kemudian hari. Sementara itu, hal-hal negatif yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan sebagai gambaran agar tidak terulang kembali di masa sekarang dan di kemudian hari (Muin, 1999). Kerinduan GAM untuk bebas dari Indonesia merupakan rasa kekecewaan yang mendalam atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, Suharto melakukan perbaikan dalam hal pembangunan ekonomi dan ketergantungan politik, yang membawa perubahan dalam kerangka permintaan politik dan keuangan di daerah Aceh. Kekayaan alam Aceh yang melimpah dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi Indonesia, mulai tahun ini ada disparitas perbaikan antara daerah tengah dan daerah (Reid, 2005).

Hal ini menunjukkan justifikasi di balik masuknya separatis dari kumpulan orang-orang Aceh yang menamakan dirinya GAM di bawah pemerintahan Hasan di Tiro pada tahun 1977 (Rosdiawan, dkk, 2007). Tidak lama setelah pernyataan otonomi, militer GAM mulai mengejar kekuasaan pemerintah Indonesia. Serangan itu dibalas dengan kegiatan membendung pembangkangan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1983, solidaritas GAM digerus di lapangan oleh tentara Indonesia. pemerintah dan Hasan di Tiro sebagai perintis GAM melarikan diri ke Swedia. Namun, selama tahun 1980-an, kekuatan GAM kembali menguat, mempertahankan status politiknya dan membentengi sayap taktisnya untuk mengimbangi kesehatan publik, pemerintah Indonesia menjawab disposisi yang membangkang ini dengan melakukan lingkup tugas militer yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeksekusi situasi dengan Daerah Tugas Taktis (DOM) di Aceh untuk menumpas GAM. Bagaimanapun, pelaksanaan status DOM belum berlaku dalam hal menghancurkan GAM. Isu ini terus berlarut-larut, mengganggu soliditas publik Indonesia (Sanusi, 2005).

Segala upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia secara konsisten telah lalai dalam menekan GAM. Ketidakmampuan otoritas publik untuk mengalahkan perjuangan pembangkang GAM telah mendorong berbagai negara seperti Swedia dan Finlandia, asosiasi global seperti Negara Assembled dan ASEAN dan asosiasi non-negara seperti Henry Dunant Cebter (HDC) dan Emergency Executive Drive (CMI) untuk membantu mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan menjadi perantara antara pemerintah Indonesia dan GAM. Kerinduan akan pertemuan-pertemuan yang asing menjadi kerukunan tengah masyarakat Indonesia dan GAM diharapkan dapat menyelesaikan perdebatan antara pemerintah RI dan GAM secara diam-diam dan tidak menggunakan cara-cara kasar (Rauf, 2000).

Kemunculan RMS sebagai isu dalam konflik 1999 yang bisa disebut sebagai Political Conflict telah membangkitkan luka lama yang melibatkan tiga sejarah antara sejarah RMS, sejarah masyarakat Maluku, dan sejarah terbentuknya negara Indonesia. Semenjak dianggap

sebagai penyebab konflik, isu RMS telah menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat. Isu ini mula-mula disebutkan oleh Yusuf Rahmi, ketua masyarakat Muslim Ambon di Jakarta, yang bersama-sama dengan ketua komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Ahmad Sumargono saat menggelar jumpa pers di Jakarta, tanggal 28 Januari 1999 atau 9 hari setelah pecahnya konflik di Ambon. Dalam keterangannya waktu itu, Yusuf mengatakan ada dua faktor yang bertanggung jawab dalam kasus Ambon. Pertama, adalah gerakan separatis RMS dan kedua adalah kelompok elit politik yang frustrasi dengan perkembangan Islam di Ambon dan ditujukan ke tempat dimana bendera RMS pernah dikibarkan pada saat konflik terjadi.

Munculnya Isu RMS dalam konflik sangatlah dini untuk bisa dikategorikan sebagai wujud (implementasi) gerakan separatis bersifat vertical yang diduga dimotori oleh Pemerintah pengasingan RMS di Belanda. Mengutip apa yang dikatakan salah seorang tokoh akademisi dan tokoh Maluku Prof. Aholiab Watloly mengatakan bahwa Isu RMS yang hadir didalam konflik 1999 bisa dibagi menjadi dua yakni RMS yang bersifat ahistoris dan historis. Ahistoris karena Isu RMS yang dimotori oleh Alex Manuputty tidak terkait sama sekali dengan gerakan RMS tahun 1950 oleh Dr. Ch. Soumokil. Hal ini diperkuat dengan salah satu perwakilan dari Pemerintahan RMS di pengasingan menyatakan bahwa motivasi oknum Dr Alex Manuputty didalam FKM tidak ada kaitannya dengan pemerintahan RMS di pengasingan Belanda, (Government in Exile).

Pecahnya konflik di Ambon, tidak terlepas dari keberhasilan gerakan reformasi menggantikan era otoritarian Orde Baru yang menginginkan rakyat untuk kembali berdaulat dan berkuasa. Munculnya organisasi FKM-RMS (Front Kedaulatan Maluku-Republik Maluku Selatan) yang memperjuangkan kemerdekaan Maluku sebagai negara berdaulat di dalam konflik mengantarkan konflik SARA ini ke dalam sebuah identitas konflik yang baru, yakni nasionalisme. RMS yang merupakan gerakan kemerdekaan di tahun 1950, meskipun telah ditumpas habis yang ditandai dengan kematian sang proklamator Dr. Chris Soumokil pada tahun 1966 ternyata belum sepenuhnya selesai. Saat ini RMS tetap eksis sebagai pemerintahan di pengasingan atau *Government In Exile* Belanda, namun pengaruh dan popularitas RMS tidaklah seterkenal sebelum konflik terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah untuk memperoleh data. Suatu langkah ilmiah harus berpedoman pada ilmu pengetahuan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penjurialan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan perspektif partisipan sebagai contoh untuk mendapatkan hasil penelitian. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan berfokus pada gambaran besar dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH DISINTEGRASI BANGSA DI MALUKU: RMS 1950

Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang memuncak pada tanggal 25 April 1950 dan diprakarsai oleh C R Steven Soumokil. Sejarah Pembangkangan Republik Maluku Selatan (RMS) memuncak pada 25 April 1950 di cadangan utama di Ambon. Perancang gerakan ini dikatakan sebagai Christian Robert Steven Soumokil. Soumokil adalah mantan Menteri Krhakiman Negara Indonesia Timur (NIT). Pada tanggal 5 April 1950, Soumokil bergabung dalam kerusuhan Andi Azis bersama NIT. Mereka berdua ingin menjaga NIT berjalan sebagai federasi. Lebih lanjut diberitakan, jika NIT bertahan, itu, Soumokil kemudian akan diangkat sebagai tokoh politik (Trijono, 2001).

Untuk sementara, NIT didekati untuk bergabung pada 4 April 1950. Seperti dikutip dalam artikel Petrik Matanasi "Soumokil Kristen dan RMS: Kompleks Separatisme Maluku", Pada tanggal 4 April 1950, Soumokil mengadakan rapat bersama Andi Azis untuk mempersiapkan hari pemberontakan hari berikutnya. Pembangkangan Andi Azis: Penyebab, Alasan dan akibat Pembangkangan DI/TII oleh Amir Fatah di Focal Java alasan Sejarah Pembangkangan DI-TII di Aceh Daud Beureueh berpartisipasi serentak sejumlah bekas prajurit KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger), dalam bergabung operasi NIT dilakukan RI terhadap Makassar di Sulawesi Selatan. Pertarungan antara pasukan Republik Indonesia dan Andi Azis menjadikan Makassar tegang. Saat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian itu, Andi Azis terpojok dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Saat berangkat ke Jakarta, Andi Aziz ditangkap. Sekitar saat itu Soumokil masih berada di Makassar hingga 13 April 1950.

Chris Soumokil dan Andi Azis rencana terikat Negara Indonesia Timur telah hilang. Akan tetapi, Soumokil tidak mau melihat banyak kenyataan kelompok yang menuntut Solidaritas Republik Indonesia. Di Ambon, Soumokil melanjutkan usaha awalnya untuk menguasai konfederasi. Ia mengundang beberapa tokoh dan mantan tokoh KNIL Ambo untuk mengumumkan kelahiran RMS. Arah Chris Soumokil ialah untuk isolat Maluku Selatan (Ambon, Buru, dan Seram) dari Republik Indonesia. Disisi lain, masyarakat Ambon yang tidak terima kehadiran RMS dan menginginkan Negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ditangkap atas perintah Soumokil. Tampaknya pengumuman lahirnya RMS dimulai secara eksklusif oleh keadaan dan desakan (Alqadrie, 1999).

Selain pemerintahan, RMS juga mendirikan sektor kemiliterannya. Tanggal 9 Mei 1950, Militer Konservatif Maluku Selatan (APRMS) didefinisikan sebagai kelompok prajurit RMS. D.J. KNIL sersan utama Samson diangkat sebagai otoritas tertinggi. Pada saat yang sama, komposisi Militer bawahannya beradaptasi dengan sistem stasiun KNIL. Sejarah Kehancuran Realm of Ternary dan Menurut NKRI, gerakan RMS sebagai perlawanan melawan pemerintahan yang mapan. Jadi ada banyak berusaha untuk mengalahkan mereka. Johannes Leimena, yang pertama dikirim untuk berunding dengan RMS sebagai wakil pemerintah pusat, tapi dia menolak (Alqadrie, 1999). Akibatnya, pemerintah harus menggunakan kekuatan tentara di bawah komando Kolonel A.E. Kawilarang. Saat itu, militer Indonesia tentara Indonesia disebut APRIS (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat).

Sebutan Negara Indonesia Serikat (RIS) digunakan sesuai kesepakatan dengan Belanda dalam Pertemuan Meja Bundar (KMB) dan penerimaan kedaulatan. Pengakuan Masa Lalu Belanda atas Sejarah Kedaulatan Indonesia Konferensi Meja Bundar (KMB): Konteks sejarah, tokoh, dan hasil perundingan Renville: Tokoh, Isi, dan Latar Belakang & Efek war pecah antar masing-masing pihak. APRIS merebut Ambon pada November 1950. RMS menyerah pada pertahanannya setelah melihat kekalahan di kota dan memilih perang gerilya. Soumokil akhirnya ditangkap pada tanggal 12 Desember 1963. Dia telah membawa ke Pengadilan Militer Khusus di Jakarta untuk diadili. Pilihan otoritas yang ditunjuk menyatakan bahwa Soumokil dihukum mati. Soumokil dihukum mati di Pulau Obi di Halmahera Selatan pada 12 April 1966 (Ralahalu, 2007).

Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan mengutus Johannes Leimena untuk negosiasi dengan Dr. Soumokil. Tapi itu ditolak. Meninggalkan ruang untuk upaya dengan cara damai

(Buchanan, 2011). Tidak ada cara lain untuk menyalahgunakan pejabat RMS. Yakni mengakhiri pemberontakan dengan cara militer. Siapa lagi selain Alex Kawilarang yang diutus kembali untuk menumpas pemberontakan RMS sehingga tentara Indonesia bersama KNIL mengalahkan pendukung RMS (Bakri, 2015). Meskipun pertempuran itu dilakukan di tanah gerilya. Tetep di depan partai Republik. Sampai suatu kejadian, Dr. Soumokil ditekan dan ditangkap, pada 12 Desember 1963 oleh pengadilan Militer, yang menjatuhkan extreme penalty. Soumokil dieksekusi pada 12 April 1966, di Selatan Pulau Obi Halmahera (Lindawaty, 2011). Tidak ada lagi tempat yang bias dikuasai, bahkan secara politik atau dengan menghasut pemberontakan rakyat.

DISINTEGRASI BANGSA DI ACEH: GERAKAN ACEH MERDEKA

Setelah tahun 1998, dimana pemerintah Pusat terus menggunakan kekuatan, negara bersama GAM dan rakyat Aceh sudah mulai menumbuhkan jiwa patriotisme di Aceh. Operasi ini mengakibatkan rentetan pelanggaran HAM berat yang menyisakan cedera yang dalam di negeri tidak pernah merasa aman. Di ranah kebijakan, politik sentralisasi government terlihat pada pengangkatan gubernur atau bupati, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara luas memastikan bahwa pemerintahan Aceh secara khusus Gubernur berada pada dibawah kewenangan hidup pemerintah pusat (SP, 2001). Kebijakan terpusat yang tidak mempedulikan budaya lokal dapat dilihat dalam UU No. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1974 5 Tahun 1979 tentang prinsip ekonomi desa. Hukum Keempat ini menghancurkan keunikan social budaya kekhasan Aceh (Abbas, 2011).

Lahirnya Undang-undang melahirkan elite baru, yakni elite birokrasi yang ternyata tidak memiliki akar di Publik. Situasi di Aceh saat itu berada dalam situasi yang sulit, akibat persaingan yang memilukan antara GAM dan pemerintahan pusat. Dilema ini menunjukkan posisi orang dalam dua posisi yang orang harus membayar banyak (Surabakti, 1999). Masyarakat, di satu sisi, harus membantu GAM secara materi, keuangan dan fisik, Namun sebaliknya, jika masyarakat memihak administrasi pusat, mereka menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan. Karena itu, diperlukan solusi optimal tanpa harus pengorbanan masyarakat Untuk kesepuluh kalinya, Aceh. Konflik tahun itu mengakibatkan orang yang berpindah dari bertani ke berdagang, beternak, atau menarik becak. Mengamati situasi seperti itu membuat masyarakat kecewa karena harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya (Ritzer & Godman, 2005).

Milisi TNI selalu mengawasi pekerjaannya, sehingga warga tidak berani untuk bersuara dan kebebasan Bergeraknya di batasi (Rosdiawan, dkk, 2007). Mediasi merupakan langkah alternatif dalam menyelesaikan banyak konflik, seperti yang terjadi di Aceh ini. Sebagai bagian dari penyelesaian masalah Aceh pada era Orde Baru, Pemerintah dari atas sering melakukan kebijakan militer bersifat menekan (Siegel, 2000). Namun, setelah reformasi, pemerintah pusat berusaha mengatasi masalah ini melalui dialog, yang membuahkan hasil di bawah Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam menyelesaikan sengketa ini. Sebab karena itu, kebijaksanaan dan kerendahan hati kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla menjadi signifikan dan menentukan dalam pelaksanaan proses damai Aceh.

Perselisihan Aceh memiliki sejarah asal usul yang panjang dan berakar kuat pada hubungan kekuasaan antara rakyat Aceh dan pemerintah pusat. Dari segi sejarah, sumber penyebab perselisihan di Aceh menghasilkan ketidakpuasan masyarakat Aceh dengan NKRI, ketimpangan, keadilan, dan menegakkan hukum dan tata kelola Negara. khususnya

perselisihan ini bermula dari perasaan tidak adil. Kasus tersebut sebagai bentuk diskriminasi, yang menimbulkan permusuhan sosial yang mendalam dikalangan masyarakat Aceh, mengubah hal-hal dan kekacauan sosial berskala besar. Selain kekecewaan, terhadap Pemerintah atas, perselisihan Aceh pula bersumber dari marjinalisasi ciri-ciri budaya kelompok Aceh. Hubungan dengan pemerintah pusat berantakan telah menyebabkan beberapa perselisihan Aceh. Dari Presiden Soekarno sampai presiden Soeharto, dia belum pernah fokus pada keinginan individu Aceh tidak pernah memperhatikan aspirasi rakyat Aceh. Frustrasi menyebabkan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah kemudian menimbulkan perlawanan yang terkordinir dan menyebabkan munculnya gerakan protes, sehingga lahirah GAM (Amin, 2014).

Sebagai bagian dari menyelesaikan masalah Aceh, seringkali pemerintah pusat menerapkan strategi yang agresif menindas sehingga banyak menyengsarakan rakyat Aceh, Mereka sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, kebingungan, dan ketakutan. banyak hal, Akan tetapi, pemerintah pusat kembali melanjutkan operasi militer mengikuti status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh B.J. Habibie sebagai Presiden yaitu 8 Agustus 1998. Upaya rezim Presiden Habibie untuk menyelesaikan perselisihan di Aceh sebetulnya berusaha mengutamakan strategi keamanan dengan menggunakan TNI beserta Polri untuk memberikan ketentraman di Aceh. Mungkin lantaran, Habibie resmi dilantik sebagai kepala negara baru, dia tidak punya kendali besar atas Polri beserta TNI, saat itu di bawah kendali Jenderal Wiranto secara pribadi. Namun, pendekatannini tidak sepenuhnya. Hal ini meningkatkan rasa frustrasi rakyat Aceh kepada rezim induk. Udara baru mulai berhembus di awal tahun 2000, kala Abdurrahman Wahid menjadi Pemimpin baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid diharapkan bertindak untuk menyelesaikan konflik di Aceh, Abdurrahman Wahid, presiden, mencoba mengambil strategi baru yang dikenal sebagai strategi ekonomi dan politik dan upaya untuk memulai dialog damai untuk menyelesaikan konflik tersebut bersama GAM (Iqbal, 2014).

Presiden Abdurrahman Wahid mulai menjabat pada 30 Januari 2000. menanyakan kepada Pusat kemanusiaan Henry Dunant (HDC) tentang kesediaannya bertindak selaku mediator saat melakukannya negosiasi atau memfasilitasi dialog tentang isu-isu kemanusiaan untuk menyelesaikan bentrokan di Aceh. Dalam pidatonya di Pusat kemanusiaan Henry Dunant (HDC) Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya dialog kemanusiaan dalam penyelesaian konflik pada 30 Januari 2000. biasanya didasarkan mengenai ideologi. HDC menanggapi positif ajakan ini. Tindakan pertama Pada bulan Januari 2000, HDC membawa RIGAM ke meja perundingan, diikuti dengan rangkaian percakapan melibatkan masing-masing pihak. Meski GAM tidak mempercayai otoritas Indonesia, namun terima segera usulan dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menginternasionalkan kasus Aceh dan memperoleh simpati atau dukungan. Negara Amerika atau Eropa dengan kepercayaan akan pers Indonesia untuk keluar dari Aceh. GAM pun mengantisipasi pembicaraan ini, mengungkapkan semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI kepada rakyat Aceh (Pane, 2001). Negosiasi yang terjadi menghasikan kesepakatan jeda kemanusiaan untuk Aceh yang di tandatangani pada 12 Mei 2000, dan Para pihak yang berkonflik menandatangani perjanjian a human pause di Aceh melalui Henry Dunant Centre (HDC). Langkah pertama atau pintu gerbang penyelesaian konflik yang sebenarnya.

Tujuannya adalah (1) Memberikan bantuan kepada rakyat Aceh akibat perselisihan melalui Komite Bersama Kemanusiaan; (2) Memberikan layanan keamanan untuk mengurangi bantuan kemanusiaan, ketegangan dan kebrutalan yang dapat menyebabkan merana lebih lanjut melalui Panitia Bantuan Pengamanan Bersama; dan (3) Memperkuat upaya menumbuhkan kepercayaan pada mencari pendekatan damai solusi damai atas situasi perselisihan Aceh (membangun kepercayaan); (4) Membentuk membantu organisasi seperti komite aksi Kemanusiaan Gabungan serta Kelompok Pemantau Prosedur Keamanan. Namun sangat disayangkan masih ada kekerasan dilapangan.

Gencatan senjata digantikan oleh perjanjian dialog Jalan Damai yang ditandatangani pada 18 Maret 2001, dimana Sebuah zona ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan GAM perdamaian (Aceh's peace zone), termasuk wilayah Bireuen dan Aceh Utara, tetapi juga tanpa kemajuan yang signifikan. Meski Meskipun HDC dianggap gagal, setidaknya ia memberikan pengalaman untuk dialog dan pertemuan menyelesaikan perselisihan Aceh berakar bukanlah hal mustahil. Setidaknya HDC bias mendialogkan kedua pihak yang berkonflik terlebih lagi, membentuk kepercayaan bersama.

Kemampuan HDC adalah kunci keberhasilannya untuk melelehkan es diantara pihak yang berselisih, membatasi dan menghaluskan disparitas besar antara pihak pemerintah dan GAM sehingga memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan. Berbagai kesalahan itu adalah pilihan oleh Pelajaran berharga dari HDC dapat diprediksi oleh praktisi menyelesaikan perselisihan selanjutnya. Langkah komprehensif tahun 2001 untuk menyelesaikan konflik di Aceh, meliputi enam bidang, termasuk politik dan ekonomi, bidang sosial, ketertiban umum, hukum, pendidikan, keamanan, dan sarana komunikasi dan informasi (Budiarjo, 2008). Abdurrahman Wahid digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001 tujuan utama menjaga keutuhan Negara. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, UU No.18 tahun 2001 tentang Status Particular Autonomy. Bersama disahkannya UU ini, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menggantikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini antara lain mengatur tentang bagi hasil 30 persen dan 70 persen antara pusat dan daerah, dengan penerapan syariat Islam pembentukan Mahkamah Syariah dan gubernur NAD dipilih langsung.

UU status Otonomi Khusus No. 18/2001 memiliki sejumlah dampak yang signifikan, antara lain ketentuan dalam UU yang mencerminkan pengalihan Inisiatif legislatif dari pejabat tinggi pemerintah ke legislatif dan provinsi, jadi tidak sekedar pengalihan kekuatan dari Negara bagian penting bagi daerah tetapi dikendalikan oleh birokrat (Soekanto, 2005). Dari dua hal tersebut, maka pemerintah pusat mengambil strategi yang berbrda dalam menghadapi perselisihan di Aceh. Perselisihan Aceh tidak dapat diselesaikan dengan memungkinkan dialog politik dengan pemerintah. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri pemberontakan Aceh, yaitu operasi terpadu pada tahun 2002, pada tanggal 9 Desember Perjanjian Penghentian Permusuhan (CoHA) ditandatangani di Jenewa.. Namun, kedua belah pihak menemui jalan lagi. Setelah pemerintah mempertimbangkan tiga pilihan kebijakan untuk dilaksanakan di Aceh Darussalam dan Nanggroe, Perpres Nomor 18 Tahun 2003 dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2003, memberlakukan keadaan peraturan militer di Aceh. Ketiga opsi ini krisis ketentaraan kedepan, krisis ketentaraan reduksi sebagai krisis sipil atau krisis ketentaraan diterapkan hanya pada daerah rawan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tiga pemilu politik diikuti dengan pemberlakuan darurat melalui Surat Keputusan Presiden Selama enam bulan, Presiden Megawati Soekarno Putri sejak 19 Mei 2004, di Aceh Darussalam adalah provinsi Nanggroe.

Hal itu diketahui dari Pilihan Presiden Megawati kepada pers di Istana Negara di Jakarta pada Selasa malam, 18 Mei, krisis sipil, otoritas warga negara biasa provinsi adalah Abdullah Puteh adalah Gubernur Nanggroe Aceh di Darussalam. Penangkapan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tidak serta merta meredam konflik dan kekerasan dialami rakyat Aceh (Sjamsuddin, 1999). Di atas adalah biaya yang harus dibayar oleh Megawati kedekatannya dengan militer menyusul jatuhnya Abdurrahman Wahid. Hasilnya Sejarah bisa diprediksi terulang kembali, Serambi Mekkah menyaksikan kekerasan demi kekerasan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator. Bidang Menko Polsoskam adalah Menteri Politik, Sosial, dan Keamanan; Menko Kesra adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla di Kabinet Gotong Royong Megawati nampaknya memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara non militer (Sjamsuddin, 1990). Selain itu, Jusuf Kalla bekerja di belakang layar (diplomasi sekunder) untuk mencapai kedalam pusat pimpinan GAM, pada satu sisi untuk melaksanakan komunikasi politik juga, secara bersamaan kumpulkan kepercayaan.

Peran penting dimainkan bagi para utusan H.M Jusuf Kalla, khususnya Farid Husein punya kemampuan menciptakan amanah secara keseluruhan, GAM selalu menjadi top management. Koeksistensi SBY-JK yang memenangkan pemilu 2004, memungkinkan diplomasi berlanjut dengan cara yang berbeda selama pemerintahannya. Upaya untuk menyelesaikan perselisihan di Aceh sangat serius dengan SBY-JK. Usaha ini tidak menyimpang dari hati, kejernihan mental dan solidaritas sosial yang dialami oleh masyarakat Aceh dalam suatu konflik yang mengakibatkan kehancuran harta benda dan jiwa serius. Menurut masyarakat Aceh, sengketa telah menggerogoti perasaan aman rakyat dan pada akhirnya menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sriyanto, 2007). Kecelakaan membawa Akhirnya berkah pun terjadi pada tahun 2004 pada tanggal 26 Desember, tsunami berdampak pada rekonsiliasi pihak yang berkonflik dan juga mempercepat upaya pemerintah Indonesia untuk mengakhiri penderitaan fisik dan mental masyarakat Aceh. Gerakan Aceh Merdeka, sebaliknya, adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat ingin menyelesaikan perselisihan di Aceh (Misbach, 2012).

Bencana ini menuntut agar Pemerintah dan GAM mempertimbangkan opsi yang lebih damai. untuk menuntaskan Pemberontakan bersenjata Aceh jelas tidak sesederhana kelihatannya. Oleh karena itu Kebijakan dan kerendahan hati kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla menjadi krusial dan menentukan dalam pelaksanaan proses damai Aceh. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dan GAM, keduanya mulai mengidentifikasi titik temu. Perundingan damai Aceh terus berlanjut Memiliki kesabaran juru runding dalam dan kedua sisi perundingan mempercepat proses Aceh damai. Presiden SBY membuat solusi perdamaian untuk masalah Aceh, dengan mengandalkan "soft power", begitu dia menyebutnya. Tak bias dipungkiri, kunjungan Jusuf Kalla ke Helsinki termasuk bertemu dengan Mr. Martti Ahtisaari dan berbagai tokoh GAM Swedia, antara lain Malik Mahmud Al Haytar, Zaini Abdullah, dan Bachtiar Juli melambangkan kerendahan hati pemimpin nasional Indonesia dalam usahanya untuk menyelesaikan Konflik Lahan Rencong Selesai setelah penandatanganan perjanjian perdamaian. Kerendahhatian adalah strategi yang bisa meluluhkan hati pejabat tinggi GAM.

GAM sepakat mengakhiri konflik yang memiliki dampak negatif yang parah terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Aceh Organisasi di bawah arahan Martti Ahtisaari, mantan Presiden Helsinki, bersikap agak lunak terhadap aktivitas GAM dan CMI di bawah pimpinan pihak ketiga, Crisis Management Initiative (CMI) yang berbasis di Helsinki Finlandia setelah satu pertemuan. Inisiatif, nota kesepahaman (MoU) dibuat di Helsinki, puncaknya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Indonesia dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia melalui perantara Martti Ahtisaari selaku Presiden Inisiatif untuk Manajemen Krisis (CMI) Sementara itu, Kedua belah pihak adalah diwakili oleh Menteri HAM dan Hukum Hamid Awaluddin dari Indonesia, sedangkan GAM diwakili oleh Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM.

Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki menyatakan bahwa Aceh menjalankan kewenangan di semua sektor public diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali pertahanan dan hubungan luar negeri. Eksternal, keamanan publik, masalah keuangan dan moneter, peradilan, dan kesempatan agama, di mana politik secara konstitusional merupakan wilayah pemerintahan Negara Republik Indonesia. Disepakati pula pengaturan pertemuan terdekat di Aceh. Terkait dengan dasar MoU, disebutkan bahwa MoU mencapai tiga poin, yaitu UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penegasan bahwa MoU Helsinki dan Nanggroe Aceh Darussalam berbasis GAM cita-cita perdamaian Aceh Darussalam perlu bagi para pihak untuk melakukan berbagai upaya dengan niat yang tulus dan baik hati. Bahwa program mediasi anggota Gerak Aceh Merdeka (GAM) terhadap nyawa warga Nanggroe Aceh Darussalam dalam lingkungan NKRI dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan Negara dan semua pihak.

Perjanjian Damai dan Proses Negosiasi Helsinki

Dalam keadaan normal, masalah perdamaian pasca tsunami Putaran pertama antara pemerintah Indonesia dan GAM berlangsung pada 27-29 Januari 2005; putaran kedua berlangsung pada 21-23 Februari 2005; putaran ketiga berlangsung pada 12-16 April 2005; dan putaran keempat berlangsung pada 26-31 Mei 2005., dan putaran kelima 12-17 Juni 2005, GAM dan pemerintah memulai tahap negosiasi di Vantaa Finlandia, Martti Ahtisaari, bekas Presiden Finlandia, tampil sebagai penengah. Pada 17 Juli 2005, berikutan 25 Di Vantaa, Helsinki, Finlandia, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM. Sebuah Memorandum kemudian dipantau oleh tim beranggotakan orang yang disebut Misi Pemantauan Aceh (AMM) yang terdiri dari lima bangsa Negara ASEAN, antara lain Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura serta beberapa bangsa anggota Swiss dan Norwegia milik Uni Eropa. Peran AMM primer menyelidiki dan mengadili dugaan pelanggaran terhadap MoU dan menjalin kerjasama antar pihak.

Poin-poin penting antara lain partisipasi pemerintah Indonesia dalam pemberian amnesti dan memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh kepada Anggota kelompok Indonesia's International Crisis Group (ICGI), organisasi mandiri yang bekerja untuk Mencegah konflik di seluruh dunia, mencatat dalam laporannya bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kemajuan negosiasi tersebut. Yusuf Kalla berinisiatif di tiga bidang tersebut. menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2004 hingga T 2009, bagaimana operasi militer mempengaruhi GAM, dan bagaimana dinamika konflik berubah setelah tsunami. Yusuf Kalla dan jajarannya, yakni Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Imam Korespondensi dan

Data Sofyan Djalil, dan Pembicaraan damai direncanakan dengan tipe Syarifudin tak lama setelah dipilih sebagai wakil presiden. Tim ini menggunakan negosiasi dan pendekatan yang berbeda dengan para eksekutif GAM baik di Finlandia dan Malaysia. Lima Putaran negosiasi di Helsinki tersebut diatas menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulannya munculnya anggapan ini dapat diselidiki itu terdapat perbedaan sosial perbedaan yang mencolok antara pemerintah pusat dan daerah. Separatisme dan disintegrasi bangsa merupakan persoalan kompleks akibat akumulasi persoalan politik, ekonomi, dan keamanan yang tumpang tindih sehingga memerlukan penanganan yang cermat dengan fokus pada aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya oleh karena itu, mengkaji fenomena ini Sebagai bangsa dan bangsa yang besar, Indonesia harus menyadaridengan jalan apa menjaga hubungan otoritas dengan penduduk sebagai dapat melaksanakan hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, (2004). Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh. Media Syariah, Vol. VI No. 11 Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Abbas, Syahrizal. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Alamsyah. (2012). Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara. Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 2 Desember.
- Alqadrie, S. (1999). Konflik Etnis Ambon Dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. Antropologi Indonesia, 58.
- Amin. (2014). Memahami Sejarah Konflik Aceh. Jakarta: Obor.
- Amirrachman, Alpha. (2007). Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. Jakarta: ICIP.
- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City. Jurnal Magister Ilmu Politik, 1(1), 51–60.
- Buchanan, C. (2011). Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, Dan Poso. Centre for Humanitarian Dialogue.
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, Robby. (1992). Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Yogyakarta: Kanisius
- Chilcote, Ronald. (2003). Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danugroho, A. (2020). Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro di Era Modern. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v2i1.289>
- Danugroho, A. (2022). Mengartikan Ketahanan Nasional. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Danugroho, A. (2022). Pendidikan dalam Kacamata Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Giddens, Anthony. (1987). Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Jakarta: Rajawali
- Iqbal, M. (2014). Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. Jurnal Hubungan Internasional, VII. No. 2.
- Lampe, Munsu. (2007). Wawasan Sosial Budaya Bahari. Makassar: UNHAS.
- Lindawaty, D. S. (2011). Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya. *Politica*, 2 (2), 271–297.

- Lokollo, dkk. (1997). *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku.
- Misbach, A. (2012). *Politik Jarak Diaspora Aceh: Suatu Gambar Tentang Konflik Sparatis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Muin, Ma'arif. (1999). *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Etnik dan Agama*. Surakarta: Ciscore
- Novaczek, Irene, dkk. (2001). *An Institutional Anaysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia*. Malaysia: ICLARM
- Pane, N. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ralahalu, Karel Albert. (2007). *Pembangunan Daerah Kepulauan Maluku dan Visi Maluku 2030*. Jakarta: Bintang Ilmu
- Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik, Sebuah Panjajangan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti
- Reid, Anthony. (2005). *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Ritzer, George dan Goodman, D. (2005). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta: Kecana.
- Rosdiawan, Ridwan, dkk. (2007). *Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat dalam Alpha Amirrachman (ed), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIP.
- Rudy, T. (2003). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sanusi. (2005). *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala.
- Siegel, James T. (2000). *The Rope of God*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1999). *Revolusi Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- SP, Varma. (2001). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada
- Sriyanto, Agus. (2007). *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*. *Ibda`*: Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5, No. 2.
- Surabakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Trijono, Lambang. (2001). *Keluar dari Kemelut Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tri.